

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono. 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhannudin A, 1995, *Administrasi Kepegawaian : Suatu Tujuan Analitik*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan S.T Cristime, 2013, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet. Pertama (edisi revisi), Bumi Aksara, Jakarta.
- Dian Setiawanl Bakti, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HAW Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HR.Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- J.Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Makhfudz M., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Melayu S.P. Hasibuan, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2014, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*, Erlangga, Jakarta.

Prof. Dr. Miftah Thoha , MPA. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, Penerbit Prenada Group, Jakarta.

Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia,Jakarta.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat,2017, *Hukum Kepegawaian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utrecht, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke empat, Jakarta.

Zainuddin Ali,2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor: K.26-30/V.100-2/99, Tanggal 19 Oktober 2015, Tentang Penjelasan Atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian.